

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI DESA KAMPUNG BARU SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Strata Satu Program Studi Administrasi Negara*



Oleh:

**RAYHAN OCTASENO PUTRA
NPM. 220411073**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

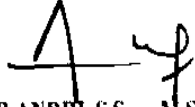
JUDUL STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
NAMA : RAYHAN OCTASENO PUTRA
NPM 220411073
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

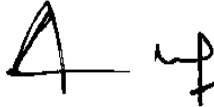
PEMBIMBING I


EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

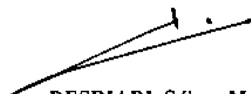
PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada .
Hari : Selasa
Tanggal : 28
Bulan Juli
Tahun . 2026

Tim Penguji

KETUA


DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

SEKRETARIS


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) ()
2. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si (Anggota Penguji I) ()
3. SAIHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rayhan Octaseno Putra

NPM : 220411073

Fakultas : Ilmu Sosial

Program Studi : Administrasi Negara

Judul Skripsi : STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 10 Juni 2026



RAYHAN OCTASENO PUTRA
NPM. 220411073

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Secara Teoritis.....	6
1.4.1 Secara Praktis	6
BAB II LANDASAN TEORI ATAU KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	7
2.1.2 Teori/Konsep Manajemen Strategi	10
2.1.3 Teori/Konsep Strategi	15
2.1.4 Teori/Konsep Kemiskinan.....	16
2.1.5 Teori/Konsep Indeks Pembangunan Manusia	24
2.1.6 Teori/Konsep Pemerintah Desa	25
2.2 Kerangka pemikiran.....	28
2.3 Hipotesa Kerja	29
2.4 Defenisi Operasional.....	29
2.5 Operasional Variabel.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Informan	32
3.3 Sumber Data	33

3.3.1 Data Primer	33
3.3.2 Data Sekunder	34
3.4 Fokus Penelitian.....	34
3.5 Lokasi Penelitian.....	34
3.6 Model Pengumpulan Data	34
3.6.1. Observasi (<i>observation</i>).....	34
3.6.2. Wawancara (<i>interview</i>).....	35
3.6.3. Dokumentasi (<i>documentation</i>).....	35
3.6.4. Gabungan (<i>tringulasi</i>)	35
3.7 Metode Analisis Data.....	36
3.7.1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	36
3.7.2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	36
3.7.3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion</i>).....	36
3.8 Jadwal Kegiatan	37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Kampung Baru Sentajo	38
4.2 Letak Geografis Desa Kampung Baru Sentajo	39
4.2.1. Luas Wilayah	39
4.2.2. Batas Wilayah	39
4.3 Keadaan Penduduk.....	40
4.4 Keadaan Sosial.....	40
4.4.1. Keagamaan.....	40
4.4.2. Pendidikan	42
4.4.3. Kesehatan.....	43
4.5 Fasilitas Umum	43
4.6 Perekonomian	44
4.7 Pemerintahan Desa.....	44
4.7.1. Struktur Organisasi Desa	45
4.7.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan	46
4.8 Unsur BPD.....	51
4.9 Unsur Lembaga Pendayagunaan Masyarakat(LPM)	52

4.10 Aktivitas Desa Kampung Baru Sentajo.....	52
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
5.1 Identitas Informan.....	54
5.1.1. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	54
5.1.2. Informan Berdasarkan Tingkat Usia	55
5.1.3. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	57
5.2.1. Indikator Pendekatan Struktural.....	57
5.2.1.1 Pembangunan infrastruktur dasar desa	58
5.2.1.2 Akses masyarakat terhadap fasilitas ekonomi	62
5.2.2. Indikator Pendekatan Protektif	65
5.2.2.1 Ketepatan sasaran bantuan sosial	66
5.2.2.2 Manfaat bantuan bagi kebutuhan dasar	70
5.2.3. Indikator Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	74
5.2.3.1 Pengembangan usaha melalui BUMDes	74
5.2.3.2 Peningkatan pendapatan masyarakat.....	78
5.3 Analisa Pengamatan Penulis Tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.....	83
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Operasional Variabel	30
Tabel 3.1 Informan Penelitian	32
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	37
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	40
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Kampung Baru Sentajo.....	41
Tabel 4.3 Jumlah Tempat Ibadah di Desa Kampung Baru Sentajo	41
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Kampung Baru Sentajo	42
Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Umum di Desa Kampung Baru Sentajo.....	43
Tabel 4.6 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa di Desa Kampung Baru Sentajo ...	44
Tabel 5.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 5.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Usia	55
Tabel 5.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kampung Baru Sentajo	45

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJA RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**Oleh:
RAYHAN OCTASENO PUTRA
NPM. 220411073**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan struktural, pendekatan protektif, dan pendekatan pemberdayaan ekonomi. Strategi tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, penyaluran bantuan sosial, serta pengembangan usaha masyarakat melalui BUMDes. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program.

Kata Kunci : Strategi Pemerintah Desa, Penanggulangan Kemiskinan.

ABSTRACT

Village Government Strategy for Poverty Alleviation in Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency

Oleh
RAYHAN OCTASENO PUTRA
NPM. 220411073

overty remains a major challenge in village development. This study aims to determine the Village Government's strategy in poverty alleviation in Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. This research employed a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The informants consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Hamlet Heads, and community members. The results show that the Village Government implements poverty alleviation strategies through structural, protective, and economic empowerment approaches. These strategies are carried out through infrastructure development, social assistance programs, and community business development through Village-Owned Enterprises (BUMDes). The study concludes that the Village Government's strategy has been implemented fairly well and has provided benefits to the community. However, its implementation has not been fully optimal due to several obstacles encountered in the execution of the programs.

Keyword : ***Strategy Village Government, Poverty Alleviation.***

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta keterlibatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kemiskinan sering dipandang sebagai masalah multidimensional yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 masih mencapai sekitar 25,90 juta orang atau sebesar 9,36 persen dari total populasi. Meskipun angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun laju penurunannya relatif lambat dan masih rentan terhadap berbagai dinamika ekonomi, seperti inflasi, krisis ekonomi global, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih memerlukan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran, terutama di tingkat daerah dan perdesaan.

Secara global, komitmen untuk mengurangi kemiskinan juga tercermin dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia menjadikan pengurangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dalam konteks ini, pemerintah daerah hingga pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran strategis pemerintah desa dalam pembangunan semakin diperkuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kebijakan tersebut, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola pembangunan di wilayahnya, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah desa juga memperoleh dukungan sumber daya melalui program Dana Desa yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah pusat. Dana Desa diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi desa, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pengurangan angka kemiskinan di tingkat lokal.

Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan yang cukup serius di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu wilayah di Provinsi Riau masih menghadapi persoalan kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 25,03 ribu orang atau sebesar 6,99 persen dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, upaya

penanggulangan kemiskinan tetap perlu dilakukan secara optimal agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

Permasalahan kemiskinan tersebut juga dapat ditemukan pada tingkat desa, salah satunya di Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini merupakan wilayah perdesaan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan karet, kelapa sawit, serta pertanian skala kecil. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor perkebunan menjadikan kondisi ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas di pasar. Ketika harga komoditas mengalami penurunan, maka secara langsung akan berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo telah melaksanakan beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pada aspek pembangunan infrastruktur, pemerintah desa melaksanakan pembangunan dan perbaikan jalan desa, drainase, jalan usaha tani, serta beberapa fasilitas umum lainnya yang bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi. Sementara itu, pada aspek pemberdayaan ekonomi, pemerintah desa melaksanakan kegiatan melalui BUMDes dan memberikan dukungan terhadap usaha kecil masyarakat sebagai upaya membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti masih adanya infrastruktur yang membutuhkan perbaikan, keterbatasan anggaran, keterbatasan modal usaha,

kurangnya pengembangan program, dan belum optimalnya partisipasi sebagian masyarakat.

Berdasarkan data monografi Desa Kampung Baru Sentajo, jumlah penduduk desa tercatat sebanyak 3.498 jiwa dengan jumlah 970 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut masih terdapat masyarakat yang tergolong dalam kategori keluarga kurang mampu. Hal ini dapat dilihat dari adanya program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat desa, salah satunya melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Berdasarkan data Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo, terdapat sekitar 40 kepala keluarga (KK) yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat desa yang berada dalam kondisi ekonomi rentan dan memerlukan dukungan dari pemerintah.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti penyaluran bantuan sosial melalui BLT Dana Desa, pengembangan kegiatan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pembangunan infrastruktur desa untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, efektivitas dari berbagai strategi yang telah dilakukan tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana program-program tersebut mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan perkiraan alokasi Dana Desa Kampung Baru Sentajo, pada tahun 2025 sebesar Rp995.274.000 dan tahun 2026 sebesar Rp986.085.000. Pada

tahun 2025, anggaran diperkirakan dialokasikan sebesar Rp144.000.000 untuk BLT Desa, Rp250.000.000 untuk pembangunan dan perbaikan jalan desa, Rp120.000.000 untuk pembangunan drainase dan sanitasi, Rp100.000.000 untuk jalan usaha tani, Rp125.000.000 untuk pemberdayaan masyarakat, Rp100.000.000 untuk pengembangan BUMDes, serta Rp80.274.000 untuk ketahanan pangan dan kegiatan pendukung. Sementara itu, pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp144.000.000 untuk BLT Desa, Rp230.000.000 untuk pembangunan dan perbaikan jalan desa, Rp115.000.000 untuk drainase dan sanitasi, Rp95.000.000 untuk jalan usaha tani, Rp125.000.000 untuk pemberdayaan masyarakat, Rp100.000.000 untuk pengembangan BUMDes, serta Rp77.085.000 untuk ketahanan pangan dan kegiatan pendukung. Alokasi tersebut menunjukkan bahwa anggaran desa diarahkan pada bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menanggulangi kemiskinan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis Strategi Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas kebijakan pembangunan desa di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan terutama bagi mereka yang tertarik terhadap permasalahan strategi pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, juga pengetahuan bagi pemerintahan desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafri (2012:3) bahwa administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi, serta *administration* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan. Dalam arti sempit, administrasi dapat dicermati dari definisi berikut: administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Prajudin Atmosudirjo (dalam Syafiie, 2006:4) bahwa administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi itu berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Nawawi (dalam Syafiie, 2006:5) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Herbert A. Simon (dalam Syafiie, 2006:3) bahwa administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Max Webber (dalam Kumorotomo, 2005:82) bahwa administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui Negara. Jadi administrasi adalah suatu proses kerjasama sekumpulan orang dalam melakukan kegiatan ketatausahaan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama.

Menurut Dunsire (dalam Keban, 2008:2) bahwa administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Luther Gullick (dalam Hamim, 2005:2) mengemukakan bahwa administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal-hal yang dilakukan dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Gie (dalam Syafiie, 2010:14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hamim (2013:2) ilmu administrasi lahir karena ada suatu tuntutan bagaimana dapat memahami tentang upaya manusia lahir karena ada suatu tuntutan bagaimana dapat memahami tentang upaya manusia di dalam mencapai tujuannya. Sesuai dengan karakteristik umum manusia bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk berkumpul. Artinya, manusia dalam mencapai setiap tujuannya memerlukan kerja sama dengan orang lain. Dalam mencapai tujuannya yang besar maka kerja sama itu perlu dilakukan secara teratur hingga terarah pada sasaran.

Menurut Hamim (2013:3) menambahkan bahwa administrasi adalah bagian atau cabang ilmu politik, kalau administrasi yang dimaksud adalah perkembangan awal administrasi negara memang betul. Tetapi dalam arti luas, ilmu administrasi tidak hanya mempelajari kerja sama manusia di dalam lembaga-lembaga pemerintah saja. Sekalipun pada perkembangan awalnya administrasi negara dianggap sebagai pengembangan dari ilmu politik, tetapi jangan sampai terjadi kesan seolah-olah administrasi hanya merupakan kajian yang berobyek lembaga-lembaga pemerintah saja.

Menurut Hamim (2013:11) dalam perkembangannya administrasi dapat dibedakan dalam dua golongan :

1. Administrasi Negara (*Public Administration*) yaitu kegiatan- kegiatan di bidang kenegaraan.

2. Administrasi Niaga (*Business/Private Administration*) yaitu kegiatan yang dilakukan dibidang swasta/niaga.

Dari uraian mengenai administrasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan administrasi merupakan kegiatan/proses yang sistematis dimana kegiatan tersebut melibatkan beberapa unsur penting guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dan dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Menurut Fayol (dalam Hamim, 2013:20) mengatakan bahwa aktivitas sebuah perusahaan industri biasanya dibagi kedalam enam bagian :

1. Teknis (produksi)
2. Dagang (beli, jual, pertukaran),
3. Keuangan (pencarian dan penggunaan optimum atas modal)
4. Keamanan (perlindungan bagi harta milik dan manusia)
5. Akuntansi (termasuk statistik)
6. Manajerial (perencanaan, organisasi, komando, koordinasi, dan pengendalian).

2.1.2 Teori/Konsep Manajemen Strategi

Menurut Certo (2010:30) manajemen strategis adalah analisis, pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Definisi ini menjelaskan dua elemen utama dari manajemen strategis.

Menurut Barney (2007:27) manajemen strategis dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi. Pada saat yang sama, strategi adalah

model alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi mempertahankan kinerja.

Menurut Grant (2008:10) strategi juga dapat diartikan sebagai rencana keseluruhan untuk menggunakan sumber daya untuk menciptakan posisi yang menguntungkan. Dengan kata lain, manajemen strategis melibatkan perumusan dan implementasi strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif.

Menurut Solihin (2012:64) manajemen strategis mengacu pada proses perencanaan, pembinaan, pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif.

Menurut Sofyan (2015:4) manajemen strategis adalah proses pengambilan keputusan yang menggunakan sumber daya perusahaan seefisien mungkin dalam kondisi lingkungan perusahaan yang terus berubah.

Menurut Assauri (2013:9) manajemen strategis adalah proses dimana organisasi atau organisasi perusahaan merumuskan dan mengimplementasikan strateginya. Dalam jangka panjang, keputusan strategis adalah keputusan yang berkaitan dengan perkembangan organisasi perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas yang berbeda secara signifikan dengan organisasi perusahaan.

Menurut Rachmat (2014:16) manajemen strategis merupakan proses pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada perumusan strategi yang efektif atau membantu perusahaan mencapai tujuannya.

Menurut Mulyadi (2011:40) manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan

mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi.

Menurut Wheelen (2010:105) manajemen strategis adalah serangkaian dari pada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang, kegiatan tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan strategis, pelaksanaan dan evaluasi.

Menurut Ritonga (2020:11) manajemen strategis dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan (internal dan eksternal), perumusan strategi, implementasi strategi, pemantauan dan evaluasi strategi. Hal tersebut disusun dari system lingkungan yang terdiri dari analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan: sumber daya, kapabilitas dan kompetensi inti) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang dikenal sebagai SWOT maupun pendekatan peran (*policy*, strategi dan fungsi) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara luas maupun spesifik, seperti :

1. Masuknya pendatang baru (skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, biaya peralihan pemasok, akses ke saluran distribusi, kebijakan pemerintah dan lainnya).
2. Ancaman produk pengganti (biaya/harga).
3. Kekuatan tawar menawar pembeli (kuantitas, mutu dan ketersediaan).
4. Kekuatan tawar menawar pemasok (dominasi, integrasi, dan keunikan).

Kuncoro (2010:174) berpendapat bahwa perumusan strategi penting dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pengambilan keputusan yang meliputi tiga tahapan yaitu tahapan input, matching dan pengambilan keputusan. Tahap input

adalah tahap untuk mengimpor dan meringkas informasi dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi.

Menurut Ritonga (2020:15) manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Isu perumusan strategi termasuk memutuskan bisnis apa yang harus dihentikan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah memperluas operasi atau diversifikasi, apakah akan memasuki pasar internasional, apakah akan melakukan merger atau membentuk usaha patungan, dan bagaimana menghindari pengambilalihan perusahaan pesaing. Keputusan perumusan strategi mengikat suatu organisasi pada produk, pasar, sumber daya, dan teknologi spesifik selama periode waktu tertentu.

Menurut Riva'I (dalam Yunus, 2016:20) bahwa proses manajemen strategi secara umum dapat dibagi dalam 3 langkah pokok yaitu :

1. Perumusan strategi (*formulating strategy*)

Perumusan strategi meliputi perumusan visi dan misi, penentuan peluang perusahaan dan ancaman eksternal, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, perumusan alternatif strategi, dan pemilihan strategi khusus yang akan diterapkan.

2. Penetapan strategi (*implementing strategy*)

Implementasi strategi termasuk membangun budaya yang mendukung strategi, membangun struktur organisasi yang efektif dan memandu upaya pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan mengotorisasi sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.

3. Evaluasi strategi (*evaluating*)

Evaluasi strategis adalah tahap terakhir dari manajemen strategis. Evaluasi strategi adalah alat untuk memperoleh informasi ketika strategi tidak berhasil. Karena faktor internal dan eksternal terus berubah, semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan. Tiga kegiatan dasar evaluasi strategis adalah :

- a. Meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini.
- b. Penilaian kinerja.
- c. Mengambil tindakan korektif.

2.1.3 Teori/Konsep Strategi

Menurut Salusu (2006:101) kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *strateus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* sendiri memiliki *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana unruk memenangkan perang.

Brecker (dalam Heene, 2010:10) penggunaan kata *strategos* itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh dengan menggunakan cara efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki.

Menurut George Steiner (dalam Rachmat, 2014:2) mengartikan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan. Strategi terdiri dari kegiatan penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Chandler (dalam Rangkuti, 2013:3) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang, rencana tindak lanjut, dan prioritas alokasi sumber daya.

Menurut Argyris (dalam Rangkuti, 2013:4) strategi merupakan respon eksternal yang berkelanjutan dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Menurut Thompson dan Strickland (2003:6) manajemen strategis memiliki aspek strategis yang harus selalu diperhatikan dalam menentukan strategi yang akan diterapkan. Aspek-aspek tersebut antara lain :

1. Mengembangkan visi dan misi organisasi Setiap organisasi membutuhkan pernyataan misi tentang tujuan organisasi. Misi menjawab pertanyaan ini: Apa alasannya? Penting juga bagi manajer untuk menentukan tujuan dan strategi yang saat ini digunakan (Robbins dan Coulter, 2004:197)
2. Mengatur tujuan organisasi, mengetahui terlebih dulu apa yang menjadi tujuan organisasi itu berdiri, sebelum merumuskan strategi dan sebagainya.
3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, manajer perlu merumuskan dan mengevaluasi berbagai strategi alternatif, dan kemudian memilih

strategi dan strategi yang saling mendukung dan melengkapi yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sebaik-baiknya keuntungan dan peluang lingkungannya.

4. Menerapkan dan mengeksekusi strategi Setelah strategi dirumuskan, strategi harus dijalankan. Sebuah strategi hanya bagus jika dijalankan dengan benar. Tidak peduli seberapa efektif organisasi merencanakan strateginya, jika strategi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, organisasi tidak akan berhasil.
5. Evaluasi hasil, pantau perkembangan baru, dan buat perbaikan dan penyesuaian strategi. Langkah terakhir dalam manajemen strategis adalah mengevaluasi hasil. Seberapa efektif strategi diterapkan? Terlepas dari hasilnya, ini merupakan masukan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan strategi dan implementasi selanjutnya, jika ada, penyesuaian apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing organisasi relatif terhadap perkembangan baru.

2.1.4 Teori/Konsep Kemiskinan

Menurut Idham dan Pananrangi (2012:33) kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Habibullah (2010:42) kemiskinan merupakan persoalan struktural, bukan individu. Karenanya persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pasar

dan pertumbuhan ekonomi semata-mata dianggap tidak akan mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (dalam Rubiyanah, 2016:3) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik , baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Bank Dunia (dalam Djumiarti, 2005:885) mendefinisikan kemiskinan sebagai. *concern with absolute standart of living of part of sociely the poor in equality refers to relative living standards across the whole society..* Artinya kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Specker (dalam Djumiarti, 2005:886) menyatakan bahwa kemiskinan mencakup :

1. Kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal.
2. Gangguan dan tingginya risiko kesehatan.
3. Risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya.

4. Kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tak bisa hidup layak.
5. Kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh
6. ketertinggalan sosial, ketertinggalan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan yang rendah.

Chambers (dalam Handayani, 2018:4) menjelaskan bentuk masalah kemiskinan dan faktor-faktor penyebab yang disebut dengan situasi kemiskinan. Konsep kemiskinan memperluas wawasan ilmu sosial tentang kemiskinan, bukan hanya kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi kondisi ketidakberdayaan (kriminalitas) akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, perlakuan hukum yang rendah, dan kerentanan. Kejahatan (*crime*). Resiko, perlakuan negatif politik, terutama perilaku yang tidak membantu meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.

Menurut Suryawati (2004:12) keadaan kemiskinan yang dianggap sebagai bentuk masalah multidimensi, terdapat empat bentuk kemiskinan :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut berarti pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai rata-rata pengeluaran atau rata-rata konsumsi kebutuhan dasar yang terkait dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak digunakan sebagai konsep standar untuk mendefinisikan atau mendefinisikan seseorang atau sekelompok orang yang disebut kemiskinan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan pendapatan yang tidak merata atau standar kesejahteraan yang tidak merata. Daerah yang tidak terjangkau oleh rencana pembangunan semacam ini sering disebut daerah rawan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan budaya adalah salah satu bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh sikap dan kebiasaan pribadi atau sosial yang biasanya bersumber dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau menggunakan cara-cara modern untuk meningkatkan taraf hidup. Kebiasaan tersebut dapat berupa kemalasan, kemewahan atau tidak pernah berhemat, kurang kreatifitas, dan relatif bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kemiskinan semacam ini biasanya terjadi pada tatanan sosial budaya atau sosial politik yang tidak mendukung pengentasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan ini terkadang diskriminatif.

5. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam, kurangnya infrastruktur umum (jalan raya, listrik dan air bersih), dan tanah yang tidak subur. Daerah dengan karakteristik tersebut biasanya

merupakan daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan, sehingga menjadi daerah tertinggal.

6. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh modernisasi atau sistem pembangunan, modernisasi atau sistem pembangunan ini tidak memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk secara merata menguasai sumber daya, sarana dan prasarana ekonomi. Kemiskinan seperti ini berdampak negatif pada konsep pembangunan (developmentalism) yang lazim dianut di negara berkembang. Tujuan pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan distribusi hasil pembangunan tidak merata, misalnya tingkat keuntungan sektor industri lebih tinggi dari pada sektor pertanian.

Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria masyarakat miskin ada 14:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging,susu,ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah / tidak tamat SD atau hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut Rencana Pembangunan Nasional (2000-2004), sesuai dengan karakteristik sistem ekonomi kerakyatan, ada dua strategi utama yang harus ditempuh dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin sementara akibat dampak negative krisis ekonomi dan kemiskinan struktural. Kedua, dengan memberdayakan masyarakat yang memiliki kemampuan usaha lebih tinggi dan mampu mencegah kemiskinan baru, berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui pengembangan usaha mikro dan kecil di berbagai kegiatan ekonomi termasuk pedagang, petani

dan nelayan kecil, penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi masyarakat (Propenas, 2003).

Menurut Andri dan Siregar (2021) Islam memandang penanggulangan kemiskinan sebagai tanggung jawab bersama yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian bantuan, pemerataan sumber daya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, fakir dan miskin termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Pada masa Nabi Muhammad , penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga dengan mendorong masyarakat yang membutuhkan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri. Prinsip pemerataan juga ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.

Pada masa para sahabat, khususnya Umar bin Khattab, perhatian terhadap masyarakat miskin juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintahan, terutama ketika terjadi masa paceklik. Berdasarkan hal tersebut, penanggulangan kemiskinan dalam perspektif Islam mencakup perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi. Prinsip ini memiliki keterkaitan dengan penelitian di Desa Kampung Baru Sentajo melalui pemberian bantuan sosial, pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Menurut Andri dan Siregar (2021), pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan pemerintah dapat diarahkan

melalui penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, serta mendukung pengembangan potensi ekonomi. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, penggunaan anggaran secara tepat sasaran menjadi penting agar program pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Bhinadi, A (2017) penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi juga pada penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosialnya. Bhinadi menjelaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan utama:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural merupakan strategi penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada perbaikan struktur sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab kemiskinan. Pendekatan ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Pendekatan Protektif

Pendekatan protektif merupakan strategi penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Pendekatan ini dilakukan melalui program bantuan sosial, subsidi, dan berbagai bentuk jaring pengaman sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin.

3. Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi

Pendekatan pemberdayaan ekonomi merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui penguatan kapasitas, peningkatan keterampilan, serta pemberian akses terhadap modal dan peluang usaha.

2.1.5 Teori/konsep Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Mahbub ul Haq (1995) pembangunan manusia merupakan proses memperluas pilihan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang panjang dan sehat, memperoleh pendidikan yang layak, serta memiliki standar hidup yang memadai. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia tersebut digunakan suatu indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut United Nations Development Programme (2020) indeks pembangunan manusia adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Indeks ini digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan manusia antar wilayah maupun antar negara.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya

membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Menurut Amartya Sen (1999) pembangunan manusia berkaitan dengan perluasan kemampuan (capability) manusia dalam menentukan pilihan hidupnya. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan menikmati kehidupan yang layak.

2.1.6 Teori/konsep Pemerintahan Desa

Menurut Blau dan Mayer (dalam Indarwanto, 2001:16) memaparkan bahwa pemerintah desa adalah lapisan pemerintah terendah.

Menurut Bayu Suryaninggrat (2000:68-69) yang dimaksud pemerintah desa adalah suatu Lembaga yang melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat yaitu pemerintahan desa. Maka pemerintah desa adalah lapisan pemerintah terendah yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan langsung dibawah camat yaitu organisasi pemerintahan desa.

Saparin (2009:19) pemerintah desa ialah simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa beserta perangkat desa yang bertugas yang mewakili masyarakat.

Widjaja (2014:3) menjelaskan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan Pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 tentang Desa, salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean governance*) harus selalu melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 tentang Desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

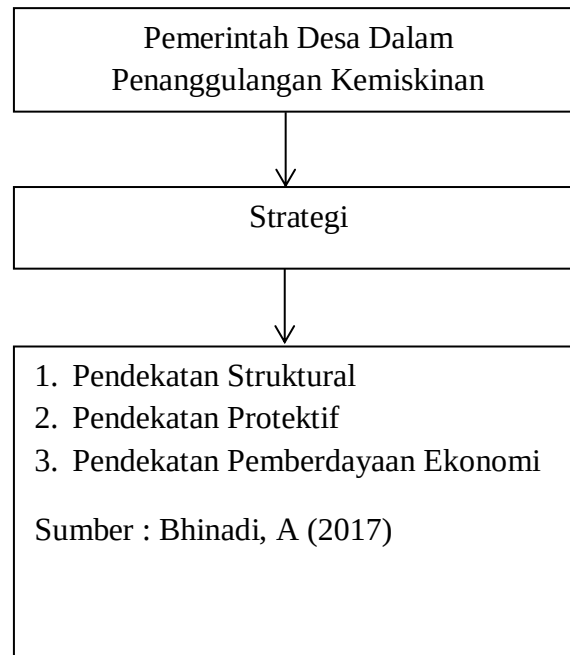
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tugas pokok pemerintahan desa Pemerintahan Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, fungsi pemerintahan desa yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti pelayanan administrasi kependudukan (surat menyurat, keterangan domisili, dll.), Penetapan Peraturan Desa (Perdes), pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan penyelenggaraan musyawarah desa.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa, Seperti perencanaan pembangunan desa (RPJMDes, RKPDDes), pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya dan adat istiadat, pembinaan organisasi kemasyarakatan desa dan pembinaan kegiatan keagamaan dan kepemudaan.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas SDM masyarakat desa, pengembangan ekonomi desa (BUMDes, UMKM desa), pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, pemuda, miskin) dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.2 Kerangka pemikiran

Gambar II. 1 : Kerangka Penelitian Tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Modifikasi Penelitian 2026

2.3 Hipotesa Kerja

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang penulis simpulkan berdasarkan observasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : Diduga Strategi Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang atau belum optimal.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan analisis data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksana ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulisan diantaranya :

2.4.1 Pendekatan Struktural

Menurut Bhinadi, A (2017) Pendekatan struktural merupakan strategi penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada perbaikan struktur sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab kemiskinan. Pendekatan ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

2.4.1 Pendekatan Protektif

Menurut Bhinadi, A (2017) Pendekatan protektif merupakan strategi penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pendekatan ini dilakukan melalui program bantuan sosial, subsidi, dan berbagai bentuk jaring pengaman sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin.

2.4.3 Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Bhinadi, A (2017) Pendekatan pemberdayaan ekonomi merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui penguatan kapasitas, peningkatan keterampilan, serta pemberian akses terhadap modal dan peluang usaha.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operasional Variabel Penelitian Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Pemerintah Desa	Strategi pemerintah Desa Dalam Penanggula ngan Kemiskinan	1. Pendekatan Struktural	1. Pembangunan infrastruktur dasar desa	Ordinal
			2. Akses masyarakat terhadap fasilitas ekonomi	
		2. Pendekatan Protektif	1. Ketepatan sasaran bantuan social	Ordinal
			2. Manfaat bantuan bagi kebutuhan dasar	
		3. Pendekatan Pemberdayaa n Masyarakat	1. Pengembangan usaha melalui BUMDes	Ordinal
			2. Peningkatan pendapatan masyarakat	

Sumber: Modifikasi Olahan 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan suatu fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang permasalahan yang dihadapi.

Sakaran dan Bougie (dalam Sugiono, 2018:139) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya adalah kualitatif, sehingga analisisnya juga analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

3.2. Informan

Menurut Moelong (2015:163) informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagian anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, dan proses yang menjadi latar penelitian.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 : Informan Penelitian Tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Informan Penelitian	Jumlah		Persentase %
		Informan	Key Informan	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Bendahara	1	1	100%
4	Kepala Dusun	3	3	100%
5	Masyarakat	4	4	100%
Jumlah		10 Orang	10 Orang	

Sumber: Data Olahan 2026

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:81) Purposive Sampling ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

3.3. Sumber Data

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2019:73) sumber data adalah subjek dari mana asal usul data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi :

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek yang akan diteliti.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut V. Wiratna Sujeni (2019:73) data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

3.4. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan judul penelitian yaitu, Strategi Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengacu pada indikator Manajemen Strategi menurut Riva'i (dalam Yunus, 2016:20).

3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Kampung Baru Sentajo yang beralamat di RT 006 RW 003, Dusun Gelugur Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6. Model Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1.6.1 Observasi (*observation*)

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik di bandingkan dengan tehnik orang lain.

Observasi juga tidak terbatas pada orang lain, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

1.6.2 Wawancara (*interview*)

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2019:31) wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bias sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi diantara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

1.6.3 Dokumentasi (*documentation*)

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi berupa metode pengumpulan data kualitatif, sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama keterbatasan pada ruang dan waktu sehingga bias dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.

1.6.4 Gabungan (*Tringulasi*)

Menurut Sugiyono (2015:83) *tringulasi* data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. *Tringulasi* juga metode yang digunakan untuk membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda. *Tringulasi* data menggunakan data dari waktu ke waktu, ruang, dan orang yang berbeda.

3.7. Metode Analisis Data

Menurut Mudjarahardjo (dalam V. Wiratna Sujarweni, 2019:34) analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan akan bertumpuk-tumpuk bisa di sederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit, karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linear dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis. Untuk mengetahui hasil olahan data dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

3.7.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2018:247-249) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topic penelitian, mencari tema dan polanya. Pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Sugiyono (2017:30) penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, atau sejenisnya. Dengan mendisplay data maka penelitian akan lebih mudah memahami fenomena yang terjadi dilapangan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Menurut Sugiyono (2019:12) penarikan kesimpulan itu ialah proses dalam mengumpulkan data, peneliti harus mengerti tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian berisikan urutan kegiatan yang dilakukan. Jadwal kegiatan ditulis sedetail mungkin agar dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai jalannya kegiatan atau penelitian dari awal sampai akhir. Jadwal kegiatan penelitian proposal ini kurang lebih 6 bulan. Dimulai dari pembuatan proposal, pengajuan judul, bimbingan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, bimbingan skripsi, dan siding skripsi.

Tabel 3.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																											
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul Proposal	X																											
2	Pembuatan Proposal			X																									
3	Bimbingan Proposal						X	X	X	X	X																		
4	Seminar Proposal											X																	
5	Revisi Proposal												X																
6	Pembuatan Skripsi													X	X	X	X	X	X	X									
7	Bimbingan Skripsi																				X	X	X						
8	Sidang Skiripsi																								X				
9	Revisi Skripsi																									X			

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup berjalan baik, tetapi pelaksanaannya masih belum optimal dan perlu di tingkatkan.

6.2 Saran

Hasil penelitian penulis dari Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- 6.2.1 Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo diharapkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur desa agar aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar dan merata.
- 6.2.2 Pemerintah desa diharapkan dapat memperbaiki pendataan bantuan sosial supaya bantuan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 6.2.3 Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan program pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan BUMDes, bantuan modal, dan pelatihan usaha masyarakat.

- 6.2.4 Masyarakat diharapkan lebih aktif mengikuti program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah desa.
- 6.2.5 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan peneliti selanjutnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri dan Siregar. (2021). *Keuangan Negara dan Daerah*. Depok: Rajawali Pers
- Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Arifin, Z. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Assauri, S. (2013). *Manajemen strategik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barney, J. B. (2007). *Gaining and sustaining competitive advantage* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Certo, S. C., & Certo, S. T. (2010). *Modern management: Concepts and skills* (12th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- David, F. R. (2013). *Strategic management: Concepts and cases* (13th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Djumiarti, T. (2005). Kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 6(1), 885–902.
- Dwiyanto, I. (2015). *Tata kelola pemerintahan desa (local governance)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Habibullah, E. S. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hamim, T. (2005). *Dasar-dasar administrasi publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamim, T. (2013). *Pengantar ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handayani, S. (2018). *Kemiskinan multidimensi*. Malang: Intrans Publishing.
- Heene, A. (2010). *Strategic capability and knowledge management*. New York: Routledge.
- Idham, & Pananrangi, A. R. (2012). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: Ombak.

- Indarwanto, T. (2001). *Pemerintahan desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kumorotomo, W. (2005). *Etika administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2010). *Strategi bagaimana meraih keunggulan kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Mahbub ul Haq. (1995). *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press.
- Mardikanto, T. (2014). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2011). *Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, H., dkk. (2017). Dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur fisik di Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 45–60.
- Purnamasari, D. I. (2016). *Analisis strategi bersaing*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rachmat, A. (2014). *Manajemen strategi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rangkuti, F. (2013). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Ritonga, P. (2020). *Manajemen strategik*. Medan: UMSU Press.
- Riva'i, V. dalam Yunus, R. (2016). *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rubiyannah, S. (2016). *Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan keputusan strategik untuk organisasi publik dan nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Saparin. (2009). *Pemerintahan desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sofyan, H. (2015). *Manajemen strategik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Solihin, I. (2012). *Manajemen strategik*. Jakarta: Erlangga.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningrat, B. (2000). *Pemerintahan desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryawati, C. (2004). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen dan Pembangunan*, 3(2), 121–135.
- Syafri, M. (2012). *Ilmu administrasi publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafiie, I. (2006). *Sistem administrasi negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, I. (2010). *Ilmu administrasi negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thompson, A. A., & Strickland, A. J. (2003). *Strategic management: Concepts and cases* (13th ed.). New York: McGraw-Hill.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report*. New York: UNDP.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2010). *Strategic management and business policy* (12th ed.). New Jersey: Prentice Hall.